



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

# PRESS CABLE

NOMOR : 225/03122008  
HARI : RABU  
TANGGAL : 3 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
<b>I.</b>	<b>INTERNASIONAL</b>	
	Indonesia Negara Terkorup Ketiga di Asean	3
	Pemerintahan Thailand Dibubarkan	3
	Pakistan tak Terlibat Mumbai, Penyerang 'Tak Bernegara'	4
	Manajemen Kespro Indonesia Terbaik di Dunia	5
<b>II.</b>	<b>NASIONAL</b>	
	<b>A. POLITIK</b>	
	Presiden Diingatkan Ada Pengadilan Internasional, Korban Penghilangan Paksa Nilai Pemerintah Abai	5
	<b>B. EKONOMI</b>	
	Wapres: Jangan Cemaskan Imbas Krisis Global	6
	Industri Unggas Memberi Harapan, Substitusi Pangan ke Produk Unggas Jadi Tumpuan	8
	The worst to come in H1 of 2009: Mulyani	8
	Asuransi Sulit Gaet Investor Asing	9
	105 Pemda Tunggak Utang Luar Negeri	10
	Irish businesses seeking joint ventures in RI	
	<b>C. SOSBUD</b>	
	Hak Paten: Paten Batik Masih Diperjuangkan	11

	<b>D.</b>	<b>HANKAM</b>	
		RI to send war ship to Lebanon	<b>12</b>
		Pertahanan Nega: Universitas Pertahanan Mendekati Kenyataan	<b>12</b>
	<b>E.</b>	<b>HUKUM</b>	<b>--</b>
	<b>F.</b>	<b>OLAHRAGA</b>	<b>--</b>
	<b>G.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>--</b>
<b>III.</b>	<b>ARTIKEL</b>		
		Indonesia Belum Negara Maritim (Oleh Muhamad Karim)	<b>13</b>
<b>IV.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>		<b>--</b>
<b>V.</b>	<b>EDITORIAL</b>		
		Hillary Clinton Perempuan Ketiga	

**Jakarta, 3 Desember 2008**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**

## I. INTERNASIONAL :

### 1. Indonesia Negara Terkorup Ketiga di Asean

INDONESIA menempati posisi ketiga sebagai negara terkorup di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau urutan ketujuh di tingkat dunia.

"Posisi Indonesia terhadap penyalahgunaan keuangan negara di tingkat ASEAN berada pada urutan ketiga setelah Filipina dan Thailand," kata Wiryono Prakoso, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Denpasar, Selasa (2/12).

Ia mengatakan korupsi dengan nilai cukup besar itu sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

Selain itu, tindak korupsi juga berpengaruh terhadap rendahnya mutu infrastruktur dan pelayanan publik, serta terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Wiryono Prakoso menjelaskan, KPK dalam melakukan upaya penyelidikan lebih memberikan perhatian terhadap pelayanan publik, antara lain kantor pelayanan Samsat, imigrasi, perpajakan dan pelayanan kesehatan.

Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

Ia mengharapkan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk bersama-sama mengatasi tindak pidana korupsi. (Jurnal Nasional)

### 2. Pemerintahan Thailand Dibubarkan

Pengadilan Konstitusi Thailand kemarin membubarkan tiga dari enam partai koalisi pemerintahan berkuasa karena terbukti melakukan kecurangan dalam Pemilu 2007.

Pengadilan juga melarang sejumlah petinggi partai berkuasa, termasuk Perdana Menteri (PM) Somchai Wongsawat, untuk berpolitik dalam jangka waktu lima tahun. Putusan pengadilan konstitusi ini memaksa Somchai mengundurkan diri dari jabatannya dan membubarkan pemerintahan berkuasa.

"Ini tidak masalah. Saya tidak bekerja untuk diri saya sendiri. Kini saya akan menjadi seorang warga negara sepenuhnya," ujar Somchai di Chiang Mai kemarin. Keputusan berani pengadilan tersebut kembali menjerumuskan Negeri Gajah Putih dalam kekacauan lebih dalam.

Keputusan ini berpotensi memunculkan kekerasan baru oleh pendukung pemerintah. Politisi dari koalisi pemerintahan berkuasa berjanji membentuk partai baru dan memenangkan pemilu parlemen, paling cepat bulan depan. Berdasarkan konstitusi militer yang diberlakukan setelah kudeta terhadap PM Thaksin Shinawatra pada 2006, partai politik mana pun yang terbukti curang dalam pemilu harus dibubarkan dan seluruh eksekutif partai dilarang berpolitik selama lima tahun.

Somchai adalah saudara ipar mantan PM Thaksin Shinawatra yang kini tinggal di pengasingan. Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Somchai diyakini sebagai wujud baru partai Thaksin, Thai Rak Thai. PPP memenangkan pemilu tahun lalu, sehingga membawa Somchai ke tampuk pemerintahan setelah berkoalisi dengan beberapa partai lebih kecil.

Pemerintahan Somchai dituding melakukan korupsi dan sebagai boneka Thaksin, belakangan juga dituduh melakukan kecurangan merekayasa suara pada pemilu lalu. "Karena pengadilan memutuskan membubarkan PPP, maka pemimpin partai dan eksekutif partai harus dilarang berpolitik selama lima tahun."

"Pengadilan tidak memiliki pilihan lain," ujar Chat Chonlaworn, ketua hakim dari sembilan hakim pengadilan, kemarin. Pengadilan juga membubarkan dua partai lain yang tergabung dalam koalisi berkuasa enam partai yang dipimpin Somchai. Merespons pembubaran ini, anggota PPP bertekad untuk terus "bergerak" dan membentuk pemerintahan baru paling cepat bulan depan.

"Kami akan bergerak ke partai baru, Puea Thai, dan mendorong pemilihan untuk PM baru pada 8 Desember," ungkap Jatuporn Prompan, anggota parlemen dari PPP. Seluruh partai dalam koalisi pemerintahan berjanji bekerja sama dengan PPP. "Anggota parlemen yang lolos dari larangan berpolitik akan bergerak membentuk partai baru untuk membentuk koalisi berkuasa yang lain," ujar mantan menteri dalam pemerintahan Somchai.

"Keputusan itu tidak mengejutkan kami semua. Tapi anggota kami terus bergerak dan kami akan membentuk pemerintahan lagi yang kami yakin masih dapat kami lakukan," ujar Jakrapob Penkair, anggota parlemen dan teman dekat Thaksin Shinawatra yang dikudeta pada 2006 dan kini menjadi buron di luar negeri. Putusan pengadilan itu disambut gembira kubu oposisi, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD). Mereka bahkan berjanji segera menghentikan aksi blokade.

Beberapa jam setelah keputusan pengadilan, PAD dan pegawai bandara telah mencapai kesepakatan untuk kembali mengaktifkan penerbangan dari Suvarnabhumi. PAD sepakat untuk mengakhiri blokade di bandara dan menghentikan 192 hari kampanye antipemerintah.

"Kami telah mencapai kemenangan. Seluruh pengunjung rasa akan menghentikan protes pada 3 Desember pukul 10 pagi. Tapi kami akan kembali turun ke jalan jika orang-orang Thaksin kembali berkuasa," tegas pendiri PAD dan pengusaha media Sondhi Limthongkul. Penerbangan di bandara juga telah mulai aktif lagi.

"Saat ini PAD telah mengizinkan penerbangan lepas landas dan pendaratan segera, baik pesawat penumpang maupun pesawat kargo," ujar anggota senior PAD Somkiat Pongpaiboon pada wartawan di bandara. Sekitar 350.000 wisatawan asing terjebak selama sepekan lebih di Bandara Don Muang dan bandara internasional terbesar, Suvarnabhumi.

Industri kargo udara telah menghentikan operasinya akibat blokade bandara oleh PAD. Kondisi itu mengakibatkan mereka merugi ratusan juta dolar. "Kami berharap dapat kembali mengoperasikan penerbangan kargo dari Suvarnabhumi hari ini," ungkap sejumlah pegawai bandara. Baht Thailand menguat terhadap dolar dan bursa saham menunjukkan optimisme begitu pengadilan mengeluarkan keputusan, namun bursa saham anjlok lagi beberapa saat kemudian.

"Ada indikasi positif dalam jangka pendek bahwa pemerintah saat ini berakhir dan PAD mungkin menghentikan protesnya," ujar Nuchjarin Panarode, ekonom di Capital Nomura Securities. "Tapi dalam jangka panjang tetap ada ketidakpastian saat kita harus menunggu pemerintahan baru dan melihat kebijakannya," papar Panarode. (Koran Sindo)

### **3. Pakistan tak Terlibat Mumbai, Penyerang 'Tak Bernegara'**

Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Selasa, dengan keras membantah bahwa negaranya terlibat dalam serangan di Mumbai, India, dan mengatakan orang-orang bersenjata yang terlibat dalam serangan tersebut adalah "aktor tanpa negara" yang berusaha menyandera dunia.

"Saya kira ini semua adalah aktor tanpa negara yang telah beroperasi di seluruh wilayah. Orang-orang bersenjata, siapa pun mereka, mereka semua adalah pelaku yang tak memiliki negara yang menyandera seluruh dunia," katanya.

"Negara Pakistan tidak bertanggung-jawab," kata Presiden Pakistan itu, dalam kutipan wawancara, ketika ditanya mengenai serangan oleh 10 pria bersenjata yang menewaskan 188 orang dan melukai lebih dari 300 orang.

"Negara Pakistan, tentu saja, tidak terlibat. Kami adalah bagian dari korban," kata Zardari.

Pakistan, Selasa, menawarkan kerjasama dengan India guna melacak mereka yang berada di belakang serangan tersebut, tapi tak menanggapi tuntutan untuk menyerahkan 20 tersangka kepada New Delhi.

Zardari menambahkan bahwa ia meragukan pernyataan India bahwa satu-satunya pria bersenjata yang lolos dari maut, yang ditangkap oleh pasukan keamanan India selama pengepungan 60-jam di kota itu, adalah warganegara Pakistan.

"Kami belum diberikan bukti nyata apa pun untuk mengatakan bahwa ia secara pasti adalah orang Pakistan. Saya sangat ragu, Larry, bahwa ia adalah orang Pakistan."

Perdana Menteri Pakistan Yousuf Raza Gilani telah mengatakan pemerintahnya menginginkan bukti mengenai tuduhan India bahwa semua penyerang adalah warganegara Pakistan.

Jaringan televisi *CNN* dan televisi lain AS telah melaporkan Amerika Serikat sudah memperingatkan India pada Oktober bahwa hotel dan pusat usaha di Mumbai akan menjadi sasaran serangan yang datang dari laut.

Pada Selasa, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan satu kelompok yang berpusat di Pakistan mungkin telah bertanggung-jawab atas serangan di Mumbai.

"Ada banyak alasan untuk menduga itu mungkin satu kelompok, yang sebagian atau seluruhnya satu kelompok, yang berada di wilayah Pakistan," kata pejabat itu kepada wartawan di sisi pertemuan menteri luar negeri NATO di Brussel.

Pejabat tersebut, yang tak menyebutkan sumber keterangannya, berbicara beberapa jam sebelum Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice dijadwalkan bertolak ke New Delhi guna membahas serangan paling akhir itu dengan pemerintah India.

Pemilik hotel Taj Mahal di Mumbai, pusat serangan, mengatakan ia juga telah menerima peringatan mengenai kemungkinan serangan dan telah meningkatkan keamanan.

Beberapa pejabat AS tak bersedia berkomentar secara terbuka mengenai laporan bahwa Amerika Serikat telah berbagi keterangan intelijen dengan India dan memperingatkan mengenai ancaman teror sebelum serangan tersebut, tapi secara pribadi mengakui bahwa informasi mengenai ancaman itu telah disampaikan. (Media Indonesia)

#### **4. Manajemen Kespro Indonesia Terbaik di Dunia**

MANAJEMEN Sistem Komoditas Keamanan Kesehatan Reproduksi (Kespro) Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Sebab, Indonesia memiliki Jaminan Keamanan Kontrasepsi (JKK), sebuah organisasi yang bertugas sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah dalam turut menyukseskan Program Keluarga Berencana Nasional.

"Kita yang terbaik di dunia. Terbukti, kita sering diundang dalam forum internasional seperti di Bangkok dan New York untuk berbagi pengalaman sukses," kata Sekretaris Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Ali Moeso usai menerima kunjungan pelatihan delegasi Korea Utara, di Jakarta (1/12).

Sistem manajemen keamanan komoditas Kespro Indonesia juga telah banyak ditiru negara lain. Antara lain oleh Nepal, Mongolia, Etiopia, dan lain-lain. "Lebih dari sepuluh negara, mereka mengirim tenaga ahli untuk mengikuti pelatihan di Indonesia," katanya, bangga.

Sistem Manajemen Keamanan Komoditas Kespro meliputi sistem teknologi informasi yang memungkinkan pola distribusi, ketersediaan, dan penyimpanan dapat terpantau baik.

Sudibyo memaparkan, JKK merupakan lembaga *pressure group* yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dari berbagai elemen tokoh masyarakat, Bapeda, anggota dewan dan juga eksekutif. "Mereka akan selalu memonitor ketersediaan peralatan kontrasepsi kita dan memberi masukan kepada pemerintah setempat agar program KB dapat terus berkesinambungan," katanya.

Hal itu, kata Sudibyo pula, untuk memenuhi enam prinsip: tepat kualitas, kuantitas, jenis, waktu, tempat dan harga. "Jadi, jangan sampai kontrasepsi yang kita kirim ke daerah tidak tepat sasaran. Seperti kontrasepsi gratis tapi dijual," katanya.

Disinggung tentang kesuksesan China dibanding Indonesia tentang program KB, Ali Moesso menjawab: tidak bisa dibandingkan. "Kita tidak bisa menerapkan prinsip kebijakan satu anak, sebab itu menyangkut hak asasi manusia," katanya.

Selain itu, Indonesia menggunakan pendekatan kekeluargaan dan mencitrakan bahwa dua anak lebih baik. "Punya keturunan adalah hak asasi manusia. Karena itu kami sekarang maju dengan slogan: dua anak lebih baik," kata Soedibyo. (Jurnal Nasional)

I :  
**NASIONAL**

A. **POLITIK** :

#### **1. Presiden Diingatkan Ada Pengadilan Internasional, Korban Penghilangan Paksa Nilai Pemerintah Abai**

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mendorong Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang kasus penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

Tiadaanya kemauan politik dan kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM bisa membuka masuknya Pengadilan HAM Internasional.

Anggota Komisi III DPR dari F-PDIP, Gayus Lumbuun, mengingatkan hal itu saat menerima Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Selasa (2/12).

"Negara yang tidak punya niat dan atau tidak punya kemampuan untuk menangani kasus HAM bisa diselesaikan di pengadilan internasional," kata Gayus mengutip Statuta Roma 17 Juli 1998, Pasal 6 dan 7, yang mulai berlaku sejak 11 April 2002 dan hingga kini sudah ditandatangani 81 negara.

Gayus mengaku tidak menghendaki kasus ini dibawa ke Pengadilan HAM Internasional karena mengganggu kedaulatan negara. "Namun, kondisi itu tidak bisa dihindari apabila pemerintah diam saja," katanya.

Willa Chandra Willa dan Nurdin sebagai anggota Pansus Orang Hilang DPR dari F-PDIP menegaskan bahwa F-PDIP memiliki kemauan kuat untuk menyelesaikan kasus ini dengan segera. "F-PDIP sangat menginginkan kasus ini selesai. Pansus ini sudah dua tahun," ucap Willa.

#### **Di mana kuburnya**

Ada 23 korban kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998. Sebanyak 13 orang sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Mereka adalah Yani Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugrah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser.

Ketua IKOHI Mugiyanto mengingatkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, DPR bisa merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM sudah menyelesaikan tugasnya dan menemukan indikasi adanya pelanggaran HAM. Namun, Jaksa Agung tidak berbuat apa-apa untuk melakukan penyidikan.

Tuti Koto, ibu Yani Afrie, juga menyampaikan kecewa karena saat menjadi presiden, Megawati Soekarnoputri pun tak menuntaskan kasus ini. "(Megawati) sama dengan SBY kok pada takut menuntaskan kasus ini. Apa karena banyak militernya?" ucapnya.

Tuti meminta Presiden Yudhoyono memberi kepastian. "Kalau sudah mati, di mana kuburnya," ujarnya lirih.(Kompas)

## **B. EKONOMI**

### **1. Wapres: Jangan Cemaskan Imbas Krisis Global**

Wapres M Jusuf Kalla meminta masyarakat agar tidak mencemaskan imbas krisis keuangan global. Menurut dia, krisis di Indonesia saat ini hanya ada dalam pikiran.

Saat membuka Rakernas IV Hidayatullah di Batam, Kepri, Selasa, Wapres menuturkan, saat ini banyak orang mengeluhkan penurunan harga berbagai komoditas dibanding kondisi pada Januari 2008. "Namun, dibanding saat tahun 2006, harga-harga itu tetap masih di atas. Jadi, yang benar, saat ini harga kembali ke normal tahun 2006," katanya.

Wapres memberikan contoh harga jagung yang pada tahun 2006 berkisar Rp 1.000 per kg, dan naik menjadi Rp 3.000 per kg pada Juli lalu. Saat ini, harga jagung turun menjadi Rp 1.200 per kg. Artinya, dibanding posisi tahun 2006, harga jagung saat ini masih lebih baik.

Begitu pula dengan harga kelapa sawit dan komoditas perkebunan lain. "Jadi, yang sulit itu pikiran kita saja," kata Wapres.

Pada kesempatan itu, Wapres juga mengatakan bahwa pemerintah telah merevisi Peraturan Bersama 4 Menteri (PB4M) atau Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri agar pendapatan buruh tidak menurun dan tetap memiliki daya beli. "Kita tak mau pendapatan pekerja yang sudah minimal lebih turun lagi," ujarnya.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, jika didasarkan pada angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan pekerja akan semakin kecil. Itu karena pertumbuhan diperkirakan mencapai 6 persen, sedangkan inflasi sekitar 11-12 persen per tahun. Jadi, kalau upah berdasar angka pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan buruh justru turun 5 persen. Artinya, pendapatan buruh yang sudah kecil malah menjadi semakin kecil lagi.

Wapres menuturkan, imbas krisis keuangan global adalah penurunan daya beli masyarakat. Karena itu, solusi yang harus ditempuh adalah memberikan uang kepada masyarakat agar daya beli mereka naik kembali.

"Pemerintah akan berikan proyek-proyek infrastruktur yang lebih banyak," ucapnya.

Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, APBN 2009 sudah menampung risiko perlambatan ekonomi dan berbagai upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi. "Kebijakan APBN 2009 menggunakan asumsi makro optimis dengan menampung seluruh risiko," katanya.

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun depan ditetapkan moderat sebesar 20 persen dan akan terus dihitung sesuai situasi mutakhir. Sementara untuk tetap mendorong pergerakan sektor riil, pemerintah memberikan insentif pajak dengan melaksanakan UU Pajak Penghasilan yang baru dengan tarif lebih rendah. Sementara penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ditingkatkan.

"Selain itu, pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen fiskal, perdagangan, dan industri untuk mengantisipasi perlambatan sektor riil. Pemerintah juga menyediakan insentif pajak untuk sektor dan daerah tertentu berdasar PP Nomor 62 Tahun 2008," ujar Sri Mulyani.

Dia juga mengatakan, pelaksanaan APBNP 2008 masih aman. Realisasi defisit, katanya, diperkirakan sekitar 1,0 persen produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dari target sebesar 2,1 persen. Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan serta bea dan cukai diperkirakan melampaui target. Produksi riil minyak juga diperkirakan melebihi target, sehingga penerimaan akan meningkat.

Pemerintah juga menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri mengikuti perkembangan harga dunia dan mendorong pencairan belanja pemerintah sehingga bisa mencapai 90-95 persen pagu. "APBN 2008 diperkirakan mengalami surplus yang dapat dipakai untuk pembiayaan APBN 2009," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur, khususnya yang berorientasi ekspor, tidak bisa dihindari. Permintaan pasar yang menurun menjadi penyebab utama.

Untuk mencegah PHK ini terjadi secara besar-besaran, menurut Anggito, pemerintah telah merancang APBN 2009 dengan mekanisme yang mendukung sektor riil di tengah situasi ekonomi yang tidak kondusif. "Berbagai insentif akan direalisasikan untuk mendorong kinerja sektor riil," ujarnya.

Sementara ekonom Sri Adiningsih menilai, sudah saatnya pemerintah turun tangan mengatasi imbas krisis keuangan global. Salah satu langkah strategis yang harus ditempuh, katanya, adalah penghematan anggaran dengan memangkas beragam subsidi yang salah sasaran.

Adiningsih memprediksi, krisis ekonomi dunia akan berlangsung lama. "Indonesia bisa lolos jika mampu mengelola krisis ini dengan memperbesar peran negara dalam sektor ekonomi," katanya.

Adiningsih lantas mengingatkan, pengalaman Indonesia dalam mengatasi krisis pada tahun 1997-1998 agar bisa dijadikan pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan dalam menghadapi imbas krisis keuangan global sekarang ini. Beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, antara lain menyelamatkan dunia usaha dari keterpurukan. Caranya dengan memberi prioritas anggaran untuk pengamanan ekonomi di dalam negeri dan menciptakan sistem jaminan sosial.

Menurut Adiningsih, perubahan kebijakan harus menjadi prioritas dengan inti masalah bagaimana mampu menghemat APBN dengan menghapus subsidi yang tidak tepat sasaran. Sesuai skenario optimistis, perekonomian baru pulih pada tahun 2010. China adalah salah satu contoh negara yang memilih menyelamatkan dunia usaha dari keterpurukan ekonomi.

"Subsidi yang salah sasaran, misalnya, subsidi minyak tanah dan listrik yang justru lebih banyak dinikmati masyarakat menengah ke atas. Padahal, mereka memiliki kemampuan membayar. Masyarakat, termasuk birokrasi di beragam tingkatan, perlu dikondisikan agar sesedikit mungkin menggunakan anggaran pemerintah. Selain itu, birokrasi juga perlu mendukung dunia usaha agar tak tergilas krisis," ucap Adiningsih.

Sementara itu, sebanyak 20 perusahaan furnitur nasional mengalami penundaan pesanan dengan nilai mencapai 70 juta dolar AS. Bahkan, jika ditambah dengan beberapa pembatalan ekspor yang lalu, maka nilainya bisa mencapai 150 juta dolar AS. Penundaan pesanan terjadi sejak triwulan ketiga 2008. Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Tangan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono mengatakan, kinerja industri furnitur hingga triwulan III-2008 mencapai volume 520,1 juta unit dengan nilai 1,23 miliar dolar AS. Sedangkan pada tahun 2007 untuk periode yang sama, mencapai 517,63 juta unit dengan nilai 1,159 miliar dolar AS atau mengalami kenaikan 6,5 persen.

Ambar juga memastikan komposisi ekspor pasar furnitur ke AS sebanyak 30 persen akan melorot hingga 15 persen dari total seluruh ekspor pada tahun ini. "Memang ada komitmen pembiayaan ekspor dari salah satu bank terbesar di China. Namun, ini khusus untuk produk furnitur yang bisa diekspor," tuturnya. (Suara Karya)

## **2. Industri Unggas Memberi Harapan, Substitusi Pangan ke Produk Unggas Jadi Tumpuan**

Krisis keuangan global mengimbas semua sektor. Dampaknya diperkirakan semakin nyata pada tahun 2009. Meski begitu, prospek industri unggas diperkirakan tetap menjanjikan karena di tengah penurunan daya beli akan terjadi substitusi pangan ke produk unggas.

Ketua Pusat Informasi Pasar (Pinsar) Unggas Nasional Hartono, Selasa (2/12) di Bogor, memperkirakan, produk unggas yang akan tetap bertahan, bahkan bisa meningkat produksinya, adalah telur ayam. "Karena telur merupakan jenis makanan yang berprotein tinggi, murah, mudah dijangkau, dan praktis," paparnya.

Krisis keuangan global pasti akan menurunkan daya beli masyarakat. Karena daya beli turun, konsumsi juga berkurang. Penurunan daya beli akibat melemahnya kinerja berbagai sektor pada akhirnya mengakibatkan banyak pemutusan hubungan kerja.

Meskipun daya beli turun akibat pendapatan berkurang, masyarakat tetap perlu makanan bergizi tinggi. Maka, akan terjadi substitusi sumber protein dari semula daging dan ikan ke telur.

Hartono memperkirakan tahun 2009 produksi telur akan meningkat 5 persen dari produksi tahun ini yang diperkirakan mencapai 860.000 ton.

Berbeda dengan telur, produksi daging ayam justru melandai. Hal itu mengingat harga daging ayam cukup mahal, mencapai Rp 25.000-Rp 30.000 per ekor. Berbeda dengan telur yang hanya Rp 16.000 per kilogram (kg). Tahun 2009, produksi daging ayam diperkirakan mencapai 910.000 ton.

### **Di bawah target**

Ketua Umum Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia Don Utoyo menyatakan, secara umum pertumbuhan industri perunggasan 2009 memang agak berat. Apalagi tahun ini pertumbuhan subsektor perunggasan di bawah target 7 persen, yakni 3-4 persen.

Meski begitu, konsumsi daging dan telur ayam masih bisa ditingkatkan. Caranya dengan mengajak masyarakat untuk selektif membelanjakan uang. Misalnya, mengalihkan belanja komunikasi atau telepon ke makanan bergizi.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Budiarto Soebijanto menyatakan, pihaknya pesimistis akan ada pertumbuhan maksimal untuk industri perunggasan.

Memang benar akan terjadi substitusi ke produk unggas karena telur memiliki banyak keunggulan komparatif. Namun, substitusi itu berlangsung perlahan dan tidak banyak. Secara umum, lapisan konsumsi akan berkurang.

### **Ketahanan sosial**

Hartono menyatakan, tetap prospektifnya industri unggas di tengah krisis keuangan global memberi harapan bagi ketahanan sosial masyarakat. Mengingat sebagian besar usaha peternakan unggas, baik daging atau pun telur, dilakukan di pedesaan.

Subsektor perunggasan juga jadi lokomotif bagi industri pertanian lain, seperti budidaya jagung.

Saat ini sekitar 12,5 juta orang atau sekitar 5 persen orang hidupnya berhubungan dengan industri perunggasan. Dari jumlah itu, ada 2,5 juta pekerja yang bekerja di sektor perunggasan.

ASEAN Business Manager DuPont Andy Gumala mengatakan, harga jagung di pasar AS saat ini turun dari 320 dollar AS per ton pada Juni 2008 menjadi 160 dollar AS. Meski begitu, petani masih dapat untung 50 persen bila mereka menanam jagung dengan produktivitas 7 ton jagung pipilan kering per hektar. Meskipun harga jagung di pasar dunia turun, budidaya jagung masih menguntungkan. (Kompas)

## **3. The worst to come in H1 of 2009: Mulyani**

The impact of the global economic slowdown will likely peak in the first half of 2009, with exports and investments the hardest hit, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said Tuesday.

"In 2009, the government sees the risk to growth as very real. Exports and investments will be hit hard due to the (poor) performance of the financial sector," Mulyani said at a hearing with the House of Representatives' Commission XI, which oversees financial affairs.

"The impact will mainly materialize in the first half (of 2009)."

However, she said that because private consumption growth could be maintained at 5 percent next year, the economy would likely grow between 5 and 5.5 percent.

"The threat of high inflation is not real, so the level of household consumption can be held at 5 percent," she said.

In the worst case scenario, she warned, Indonesia's economy could slow to 4.5 percent next year.

The central bank predicts inflation in 2009 will hover between 6.5 and 7.5 percent, down from the 11.5-12.5 percent range it straddled this year. Inflation in November rose 11.68 percent from a year earlier, according to the Central Statistics Agency (BPS).

Private consumption usually makes up about 70 percent of Indonesia's economy, with exports and investments contributing the rest.

In the third quarter of 2008, the country's economy grew by 6.1 percent from a year earlier, the BPS reported.

Indonesia began feeling the impact of the global economic slowdown in October, when exports dropped by about 12 percent from the previous month as importing countries slashed demand.

Top global research and advisory firm, the Economist Intelligence Unit, predicted Indonesia's economy would grow by 3.7 percent in 2009, while Swiss-based financial firm UBS projected 2.5 percent growth.

However, local economists remain upbeat the economy can grow more. Danareksa Research Institute chief researcher Purbaya Yudhi Sadewa said the economy could grow by 5.9 percent in 2009, supported by domestic demand, while renowned economist Faisal Basri forecast 5.8 percent growth.

Mulyani said the government was providing a trade financing facility to help exporters and importers. Imports of unessential consumer goods will be reduced to help local industries compete with cheap imported goods, while support for market diversification for exports will be maintained.

To support the real sector, the government will inject Rp 120 trillion (US\$9.68 billion) this month and spend another Rp 90 trillion as early as next year to build infrastructure, including roads, bridges, ports, railways and telecommunications infrastructure, Mulyani said.

Rural areas will be given Rp 10.3 trillion to develop infrastructure. Agriculture subsidies have been raised from Rp 27.9 trillion this year to Rp 33.4 trillion in 2009, including Rp 17.1 trillion for fertilizer.

The government is also offering Rp 12.5 trillion in the form of waived income and value added taxes, as well as import duties, to help industries cope with the economic downturn. (The Jakarta Post)

#### **4. Asuransi Sulit Gaet Investor Asing**

Pelaku asuransi akan sulit memperoleh suntikan modal dari investor asing karena sektor keuangan masih belum pulih dari krisis.

Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi (STMA) Trisakti Munawar Kasan mengatakan, asuransi mengalami pukulan berat karena harus menambah modalnya di tengah krisis keuangan global. Dukungan modal dari investor asing, yang selama ini masih menjadi andalan, akan sulit diharapkan.

Menurut dia, pukulan krisis akan membuat investor dari luar negeri hati-hati menempatkan dananya di Tanah Air. Khususnya, untuk industri asuransi yang memiliki rasio penetrasi terhadap Produk Domestik Bruto masih kecil.

"Mereka akan sangat cermat berhitung, kapan akan kembali modal. Apalagi, di tengah ancaman resesi ekonomi global saat ini," kata dia di Jakarta, kemarin.

Seperti halnya di lembaga jasa keuangan lain, investor asing umumnya memiliki dukungan modal yang kuat. Satu per satu bank-bank kecil jatuh ke tangan asing saat Bank Indonesia mewajibkan pemenuhan modal minimum Rp100 miliar pada akhir tahun 2010.

Pemodal asing lebih disukai ketimbang lokal karena juga menawarkan harga pembelian yang jauh lebih kompetitif. Investor pendiri juga ingin menikmati untung dari hasil penempatan dana selama bertahun-tahun.

Dia menjelaskan, asuransi mau tidak mau harus mengembangkan pola konsolidasi dengan cara bergabung dengan asuransi lain yang juga belum memenuhi ketentuan modal minimum.

Beberapa asuransi sudah mulai melakukan peninjauan untuk merger sembari berusaha mencari mitra strategis.

"Terutama, untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki induk yang sama. Langkah merger untuk mereka relatif lebih mudah," kata dia.

Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Isa Rachmatarwata menambahkan, beberapa perusahaan asuransi telah membuka diri dan menyampaikan niatnya untuk merger.

Bapepam-LK tengah mengumpulkan rencana kerja dari seluruh perusahaan asuransi terkait kewajiban memenuhi modal minimum Rp100 miliar pada akhir tahun 2010. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, asuransi harus memenuhi modal secara bertahap hingga Rp100 miliar pada akhir tahun 2010.

Beberapa asuransi lain yang juga tengah mencari investor strategis adalah Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, Binagriya Upakara, Asuransi Dharma Bangsa. PT Bank Mandiri Tbk berencana mengakuisisi asuransi untuk membantu pengembangan bisnisnya. (Jurnal Nasional)

## **5. 105 Pemda Tunggak Utang Luar Negeri**

Sebanyak 105 pemerintah daerah (pemda) tercatat menunggak pembayaran utang kepada pemerintah pusat sebesar Rp746,6 miliar.

Sebagian besar dari utang yang bermasalah tersebut berasal dari utang luar negeri yang diteruskan ke daerah melalui skema subsidiary loan agreement (SLA). Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (Depkeu) Herry Purnomo mengatakan, jumlah tunggakan tersebut separuh dari total utang Rp1,58 triliun yang dipinjam 192 pemda. Adapun sumbernya, Rp1,2 triliun dari utang luar negeri, Rp60 juta dari rekening dana investasi (RDI), dan Rp320 miliar dari rekening pembangunan daerah (RPD). "Posisi yang menunggak di luar tunggakan PDAM.

Yang ini murni utang pemda, yang datanya tidak berubah dari bulan Juni lalu," kata Herry di Jakarta kemarin. Perincian status tunggakan 105 pemda tersebut adalah, 55 pemda utang macet atau tidak membayar sejak 1,5 tahun yang lalu, 2 pemda diragukan mampu membayar, 11 pemda tidak lancar, dan 37 pemda kurang perhatian. Herry mengatakan, ada tiga masalah di internal pemda yang membuat mereka tidak membayar utang. Pertama, sengketa tanggung jawab pasca pemekaran daerah.

Menurutnya, setelah pemekaran, masing-masing pemda menolak untuk bertanggung jawab atas utang tersebut. Kedua, salah urus pengelolaan utang, di mana penggunaan dana utang tidak sesuai peruntukan proyek. Ketiga, proyek yang dibangun tidak menghasilkan. "Sehingga tidak bisa membayar," katanya. Data Depkeu menunjukkan, total tunggakan utang Rp746,6 miliar tersebut terdiri dari Rp217,4 miliar merupakan pokok utang dan Rp529,2 miliar adalah akumulasi bunga dan denda. Menurut Herry, pemerintah pusat sedang menertibkan tunggakan utang ini melalui program restrukturisasi.

Mekanisme restrukturisasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 153/PMK.05/2008. Tujuannya agar tunggakan tersebut tidak membuat pemda kesulitan untuk melakukan investasi dari dana utang lagi. Restrukturisasi dihitung atas jumlah tunggakan hingga 22 Oktober 2008.

Skemanya, tunggakan pokok wajib dibayar dengan penjadwalan ulang, sementara nonpokok di bawah Rp5 miliar dihapuskan, sedangkan di atas Rp5 miliar dibayar lewat kombinasi antara penghapusan dan pengalihan pembayaran atau debt swap. "Debt swap dialihkan untuk proyek-proyek infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," kata Herry. (Koran Sindo)

## **6. Irish businesses seeking joint ventures in RI**

Irish businesses are keen to invest in the country by setting up joint ventures with Indonesian counterparts to eventually bolster trade between the two nations, Ireland's Ambassador to Indonesia H.E Richard O'Brien said on Tuesday.

For that purpose, a group of Irish companies and foreign trade executives have arrived in town to meet delegates from Indonesian business, political and academic circles to discuss trade and joint venture prospects.

"Indonesia is very promising and has a lot to offer," O'Brien said of the reasoning behind the delegation's visit to Indonesia.

The meetings will involve presentations from experts and entrepreneurs to develop a business agenda between Indonesia and Ireland in various sectors -- in particular telecommunications, energy, transportation and pharmaceutical sectors.

Several meetings have already been held.

Currently, Indonesia and Ireland's trade volume remain fairly small, amounting to around 200 million euros, with "120 million euros accounted for by Indonesia's commodity and textile exports to Ireland."

Micheal Smith, the embassy's secretary for Asia Pacific ICT and energy policy, said Ireland expects to double that amount in three to five years.

Included among the business delegation are food ingredients giant Kerry Group, telecommunications company Tango Telecom and the maritime management company Dublin Port.

On Monday evening, the delegation met with representatives of consumer goods giant PT Unilever Indonesia, shipping company PT Berlian Laju Tanker, and state pharmaceutical company PT Kimia Farma.

No details emerged as yet from the meeting.

Some Irish companies have already established economic relations with Indonesia. For example, Tango Telecom partnered with PT Lintas Teknologi Indonesia to enhance Bakrie Telecom's text messages services.

Dublin Port is in a joint venture with Sabang Area Development Institution (BPKS) to pave the way to build an international container port in Sabang, Aceh.

"We are currently waiting for the approvals from the Aceh government and the Dublin Port's board," Dublin Port's Head of Research for Development and International Sections Ken Whelan said.

According to Whelan, the joint venture will cost the company an initial investment of around US\$5 million.

"If the port is to be in full operation by next year, it will give us a turnover revenue of around \$40 million and a profit margin of \$15 million, five or six years down the line."

Ireland's economy, which for the past five years has received a considerable boost from its technology and telecommunications business sector, is currently being hit by the global economic crisis which is affecting its banks, housing sector and exports.

"We have a very open economy, and a close relationships to the U.S., which makes us not immune to the crisis," Smith said.(The Jakarta Post)

## **C. SOSBUD**

### **1. Hak Paten: Paten Batik Masih Diperjuangkan**

Pemerintah akan memperjuangkan benda-benda yang merupakan hasil kebudayaan tradisional seperti batik, untuk mendapatkan perlindungan hak paten melalui forum World Intellectual Property Organization (WIPO). Hal tersebut perlu dilakukan supaya negara lain tidak lagi mengklaim sebagai penemu batik.

Direktur Jenderal Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwantar mengatakan hal tersebut, Selasa (2/12), di sela-sela acara The 2nd WIPO International Conference on Intellectual Property and The Creative Industry di Nusa Dua, Bali. Konferensi tersebut dibuka Menko Kesra Aburizal Bakrie.

Sapta mengatakan, selama ini benda-benda hasil kebudayaan tradisional seperti batik sulit mendapatkan hak paten karena merupakan ciptaan yang bersifat komunal, bukan individual.

Deputy Director General Copyright and Related Rights Sector WIPO Michael Keplinger menjelaskan, berdasarkan survei WIPO, industri kreatif bisa menyumbangkan enam persen dari produk domestik bruto suatu negara. Michael Keplinger menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki perkembangan industri kreatif paling dinamis.

Dirjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Hukum dan HAM Ansori Sinunga mengatakan, saat ini sedang disiapkan RUU untuk merevisi Undang-Undang HAKI yang memiliki sejumlah kelemahan. Revisi tersebut antara lain mengatur mengenai hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, desain integrated circuit, rahasia dagang, dan varietas tanaman baru. (Kompas)

**D. HANKAM :**

**1. RI to send war ship to Lebanon**

Indonesia will send a war ship to Southern Lebanon to help build stability in the region, a top Navy official said on Tuesday.

Fulfilling a request from the UN, the Indonesian Navy will send KRI Diponegoro to Lebanon, RI Navy deputy chief of staff Rear Admiral Moekhlas Sidiq told Antara news agency on Tuesday.

"This is an honor on the international stage. In terms of land deployments (Army) the Indonesian military has been helping (the UN) for decades. March 2009 will be the first time we have been entrusted to send a war ship. This is why we are sending the newest one we own," Sidiq said.

The UN is scheduled to inspect the ship prior to its departure, Sidiq said. "What is for certain is that this is a peacekeeping mission -- not a war. We are working very hard to get prepared," he said.

Five countries have been asked to serve in the tumultuous region for a six-month operation. Previously, the Indonesian military has deployed 1,136 personnel to Lebanon under the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), to help restore peace and security in the region. (The Jakarta Post)

**2. Pertahanan Nega: Universitas Pertahanan Mendekati Kenyataan**

Setelah mengalami pasang-surut dalam penyiapannya, Universitas Pertahanan Indonesia atau Unhan kini maju selangkah lagi untuk menjadi kenyataan. Pada Januari 2009 akan dilangsungkan lokakarya pematangan kurikulum dan pada Maret 2009 Unhan akan resmi diluncurkan dengan satu seminar internasional.

Dirjen Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayjen TNI Syarifudin Tippe ketika memimpin rapat persiapan Lokakarya Unhan, Selasa (2/12), menyebutkan, Unhan divisikan menjadi lembaga intelektual pertahanan yang terintegrasi dengan sistem nasional dan internasional dalam kerangka kerja sama studi pertahanan. Sementara misi Unhan adalah untuk mencetak calon pemimpin sipil dan militer yang berpengetahuan, serta untuk transfer iptek dan manajemen pertahanan secara komprehensif melalui program pendidikan multidisiplin.

Dengan itu pula, tambah Dirjen Strategi Pertahanan, dapat dikembangkan kapasitas pertahanan negara. Melalui Unhan akan bisa diwujudkan pula pelembagaan pemikiran hubungan sipil-militer.

"Keberadaan Unhan sebagai lembaga intelektual pertahanan akan menyempurnakan sistem pendidikan pertahanan negara dalam menghadapi tantangan strategis," kata Dirjen.

**Seminar internasional**

Sementara itu, untuk peluncuran yang dijadwalkan dilakukan Presiden RI ini, kini tengah dipersiapkan satu seminar internasional yang akan menghadirkan pakar asing.

Dalam paparannya di depan narasumber dari berbagai kalangan, Kamis pekan silam, Kapten Inf Agus Harimurti Yudhoyono yang ikut serta dalam pendirian Unhan menyampaikan bahwa topik utama seminar mencakup keamanan Asia-Pasifik pada masa depan, juga upaya penanggulangan terorisme.(Kompas)

**E. HUKUM : Tidak Ada**

**F. OLAH RAGA : Tidak Ada**

**G. LINGKUNGAN HIDUP : Tidak Ada**

**III. ARTIKEL :**

**1. Indonesia Belum Negara Maritim (Oleh Muhamad Karim)**

Diskusi di Sinar Harapan beberapa waktu lalu mengemuka pernyataan Prof Dr Hasyim Djalal bahwa Indonesia belum menjadi negara maritim, melainkan masih dalam proses menuju ke sana. Mengapa pernyataan itu mengemuka? Jawabnya, sederhana saja. Indonesia belum

mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan, yakni sumber daya alam (ikan, tambang), transportasi, pariwisata bahari, industri bioteknologi dan jasa kelautan. Dus, mengapa kita sekarang sudah berupaya menggerakkan ekonomi kelautan, tapi justru jalan di tempat? Apakah ada yang keliru dengan kebijakan pembangunan ekonomi kelautan kita? Jawabnya adalah bagaimana menganalisisnya dalam kacamata antropologis, historis dan sosiologis.

Secara antropologis, ekonomi kelautan Indonesia berakar pada kebudayaan masyarakat Indonesia yang sejak dahulu sebagai bangsa pelaut. Berbagai literatur dan hasil kajian antropologis membuktikan bahwa manusia Indonesia sudah menjelajahi perairan Nusantara sampai ke Madagaskar di Afrika pada abad ke-7, masa kolonialisme abad 17-19 sampai menjelang Indonesia merdeka (baca: Antony Reid). Penggalan situs Delta Sungai Batanghari di Jambi membuktikan bahwa masyarakat pesisir di wilayah itu sudah menggerakkan aktivitas ekonomi pesisirnya dengan temuan alat tangkap ikan jenis bubu. Bahkan, di pelbagai pesisir pantai di Jawa dan Sumatera ditemukan situs perahu kuno, dan kerajaan maritim Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Kerajaan Banten.

Sebuah hasil riset juga membuktikan aktivitas bisnis teripang sudah berlangsung sejak abad 14 yang dilakukan orang-orang Sulawesi Selatan. Bahkan, mereka menangkap teripang sampai ke Australia dan seluruh perairan Nusantara. Salah satu situs lukisan Gua di Pulau Muna Sulawesi Tenggara menggambarkan manusia melakukan aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan perahu. Maknanya secara antropologi, manusia Indonesia memiliki ikatan yang kuat dengan sumber daya kelautan untuk mempertahankan kehidupannya.

#### **“Dual Economic”**

Secara historis-sosiologis membuktikan, perdagangan dan pelayaran yang berlangsung di Nusantara pada abad 15-19 menjadi penggerak utama perekonomian kerajaan-kerajaan Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa berupaya keras mencapai Nusantara demi menguasai perdagangan rempah-rempah yang dihasilkan pulau-pulau kecil di Maluku. Tidak berbeda dengan pulau lain di Nusantara. Produk unggulan lokal diperdagangkan secara global dengan basis kekuatannya ekonomi kelautan. Komoditas dari pantai barat dan pantai timur Sumatera adalah kapur barus, lada, kopi, dan karet. Dari Kalimantan diperdagangkan kayu dan hasil hutan lainnya. Komoditas Sulawesi berupa kayu hitam, kelapa, kapas dan ikan. Dari Nusa Tenggara kayu cendana.

Pilar ekonomi kelautan adalah komoditas unggulan lokal, perdagangan antarpulau, internasional serta kepelabuhan dengan basisnya kota pantai. Mencermati dinamika ekonomi Nusantara masa itu, sejatinya adalah sebuah model Dual Economic. Di level makro, komoditas perdagangan internasionalnya bersumber pada pertanian dan tanaman perkebunan di satu sisi. Tapi, di sisi lain sektor jasanya transportasi laut. Pada level mikro aktivitas subsistem masyarakatnya berbasiskan pertanian tanaman pangan dan perikanan.

Buktinya, masyarakat pulau-pulau kecil di Maluku pada masa lalu selain berprofesi sebagai petani pala dan cengkih, juga beraktivitas menangkap ikan dengan komoditas andalannya adalah teripang, jenis ikan pelagis segar maupun yang diolah (ikan kayu). Ini sudah membudaya dalam komunitas masyarakat pesisir di Indonesia baik yang bermukim di pulau-pulau kecil maupun pesisir. Tengoklah masyarakat Kepulauan Raja Ampat, selain berprofesi sebagai nelayan juga sebagai petani sagu maupun peramu yang diperoleh dari hutan. Makanya, di daerah ini ada tanah adat dan hutan adat. Tapi, ada juga wilayah laut yang dimiliki secara adat dengan model pengelolaan berbasiskan kearifan tradisional.

Sayangnya, sekarang pemerintah justru akan memprivatisasi wilayah laut dengan konsep Hak Pengelolaan Perairan Pesisir (HP3) yang amat a-historis. Tidak pernah ada, dalam pengelolaan perairan laut di Nusantara, termasuk di masa kolonial pun, penguasaan laut Nusantara oleh pihak pemilik modal apalagi boleh dialihkan (transferability) dan diperjualbelikan. Sesuatu tanpa akar sejarah adalah “kesesatan”, dan melembagakannya bisa mengundang konflik.

#### **Mengembalikan “Khitah”**

Secara sosio-antropologis, menggambarkan dinamika interaksi antara masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir lebih progresif dibandingkan pedalaman. Dinamika oseanografi perairan laut (gelombang laut, arus, upwelling, dan angin) cenderung mempengaruhi perilaku dan sistem nilai dalam konstelasi budaya politik masyarakat Indonesia. Perilaku yang tegas, jujur, berani, egaliter, terbuka dan menerima pluralisme lebih dominan berkembang dalam masyarakat pesisir.

Mereka memosisikan dinamika oseanografi sebagai bentuk tantangan yang membutuhkan keberanian, kejujuran, dan kerja sama antara sesama komunitas. Masyarakat pesisir memiliki interaksi yang tinggi - melalui pelayaran dan perdagangan - dengan komunitas internasional yang beragam entitas budaya, etnik, agama, dan ras. Akibatnya, mereka lebih berpandangan pluralistik ketimbang masyarakat pedalaman.

Sebagai masyarakat pelaut, nelayan, dan pedagang, masyarakat pesisir dalam berlayar, berdagang dan menangkap ikan mengutamakan sikap dan budaya keterbukaan, kerja sama, dan egalitarian. Berkembangnya sikap dan budaya ini karena selalu berhadapan dengan bahaya sewaktu-waktu yang bersumber dari alam maupun manusia (bajak laut). Perilaku yang berkembang dalam masyarakat pesisir mirip sistem nilai masyarakat demokrasi dalam negara modern.

Dekonstruksi antropologis, historis dan sosiologis tersebut di atas menggambarkan betapa pentingnya ekonomi kelautan yang dibangun secara dual economic. Pola ini tak hanya mempengaruhi dinamika ekonomi masyarakat, tapi juga kebudayaan dan sistem nilainya yang berkembang bahkan sampai kini. Sayangnya, ketika Indonesia merdeka dan di era Orde Baru sampai reformasi kini, pola dual economic yang menopang ekonomi kelautan justru tergerus dari akarnya. Padahal, ia sudah menjadi bagian kebudayaan, dan sistem ekonomi (way of life) yang berkembang secara turun-temurun di bumi Nusantara ini.

Diperlukan rekonstruksi bangunan puing-puing dual economic berbasis kelautan sebagai alternatif membangun kekuatan ekonomi bangsa demi mewujudkan "negara maritim". Upaya ini membutuhkan dukungan politik yang kuat secara institusional dan struktural. Rekonstruksi ini sekaligus memetakan kekuatan dual economic Indonesia secara geografi dan geo-ekonomi dari wilayah barat sampai timur. Sudah pasti pula mengintegrasikan kekuatan ekonomi terestrial dalam bentuk basis komoditas perdagangan. Inilah kekuatan baru yang secara progresif mengembalikan "khitah" Indonesia sebagai negara maritim.(Sinar Harapan)

**IV. LAIN-LAIN : T i d a k**  
**Ada**  
**V. EDITORIAL :**

#### 1. Hillary Clinton Perempuan Ketiga

Memang, dia bukan perempuan pertama di AS yang menjadi menteri luar negeri. Sebelumnya sudah ada Madeleine K Albright dan Condoleezza Rice.

Akan tetapi, penunjukan Hillary Dianne Rodham Clinton (61) menjadi menteri luar negeri kabinet presiden terpilih Barack Obama mempunyai arti lain dibandingkan dengan menlu-menlu sebelumnya. Ia merupakan tokoh paling terkemuka di zaman modern ini yang menduduki menteri luar negeri: kandidat presiden dan mantan ibu negara, serta senator.

Inilah peristiwa yang pertama sejak tahun 1881 saat James AS Garfield (presiden ke-20) memilih James Blaine, seorang presiden terpilih, memilih lawan politik utamanya menjadi menteri luar negeri. Selama kampanye untuk menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat, ada perbedaan mendasar dalam politik luar negeri antara Hillary Clinton dan Obama.

Hillary Clinton mempertanyakan keinginan Obama untuk membuka dialog dengan Presiden Irak Mahmoud Ahmadinejad. Sebaliknya, Obama mempertanyakan dukungan Hillary Clinton pada perang Irak. Hillary Clinton juga dikenal sebagai tokoh garis keras dari kubu Demokrat, dalam politik luar negeri. Misalnya, dalam masalah Timur Tengah, ia mendukung posisi Israel.

Akan tetapi, mengapa Obama tetap memasukkannya dalam kabinet? Filosofi Obama jelas, menggunakan semua sumber daya dari semua lini dan spektrum untuk memperbaiki profil AS, baik di bidang militer, ekonomi, maupun diplomatik yang belakangan ini kedodoran.

Mampukah Hillary Clinton memainkan perannya? Mengutip pendapat James M Lindsay dari Universitas Texas, ada tiga kunci keberhasilan seorang menlu. Pertama, seorang menlu harus memiliki gabungan antara kecerdasan politik dan visi akan dunia. Kedua, seorang menlu harus percaya dan mendukung presiden. Dan ketiga, seorang menlu harus memiliki semangat kerja yang kuat dan membuang jauh-jauh egonya.

Untuk yang pertama dan ketiga, Hillary Clinton dapat memenuhinya. Tetapi, bagaimana hubungannya dengan presiden? Melanne Verveer, mantan kepala staf ketika Hillary Clinton masih menjadi ibu negara, mengatakan, "Ia mempelajari arti pentingnya tidak muncul matahari

kembar antara presiden dan menlu dalam kebijakan luar negeri.” Dengan kata lain, ia tahu diri akan posisinya.

Apa pun, kita berharap tampilnya Hillary Clinton sebagai menlu akan mampu membawa AS lebih bersahabat dengan negara lain, termasuk Indonesia, dan mampu mendorong AS lebih aktif dalam mengupayakan perdamaian. Dengan demikian, Obama mampu mewujudkan mimpinya membawa AS ke babak baru.(Kompas)

**Jakarta, 3 Desember 2008**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**  
**Deplu**